



Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024



@humas.ppsnzj



humas.ppsnzj



www.kkp.go.id/djpt/ppsnzj



RENCANA STRATEGIS

**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA
NIZAM ZACHMAN JAKARTA**

TAHUN 2020-2024

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN

- A Latar Belakang 2
- B Kondisi Umum 2
- C Lingkungan Strategis 5
- D Kedudukan 8
- E Tugas dan Fungsi 10
- F Maksud dan Tujuan 12
- G Alur Pikir 12

BAB 2. VISI, MISI, DAN TUJUAN

- A Pembangunan Kelautan dan Perikanan 14
- B Pembangunan Perikanan Tangkap 15

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- A Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan 20
- B Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap 28

BAB 4. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- A Target Kinerja 44
- B Kerangka Pendanaan 46

BAB 5 PENUTUP 48

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga selesailah penyusunan Rencana Startegis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2020-2024 (perubahan).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta telah menyusun Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2020-2024 (perubahan). Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program dan kegiatan pengelolaan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang akan dilaksanakan langsung pelabuhan perikanan dengan mendorong peran aktif masyarakat perikanan di kawasan pelabuhan perikanan selama kurun waktu tahun 2020–2024.

Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2020-2024 (perubahan) sebagai pedoman perencanaan bagi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dalam menyusun rencana kerja program dan kegiatan tahunan dalam pembangunan perikanan tangkap selama lima tahun yang berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta baik untuk lingkup pelabuhan perikanan maupun stakeholder/pengguna jasa di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta serta pihak-pihak lain yang terkait.

Jakarta, 18 Januari 2022

Kepala Pelabuhan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran visi Indonesia 2045 untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Pencapaian visi tersebut dilakukan melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Pidato Presiden pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 menyampaikan fokus-fokus pembangunan dalam lima tahun ke depan meliputi pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

Kelima fokus program utama arahan presiden tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Pembangunan perikanan tangkap 2020-2024 memiliki keterkaitan erat secara langsung dengan agenda penguatan ekonomi serta pengembangan wilayah.

Kegiatan pembangunan sub sektor perikanan tangkap oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Potensi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap Indonesia masih sangat besar, yaitu potensi lestari sebesar 12,54 juta ton per tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, serta pemanfaatan usaha yang baru mencapai sebesar 7,53 juta ton sampai tahun 2019.

Berbagai upaya akselerasi pembangunan perikanan tangkap selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, serta konsumsi ikan masyarakat, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.

B. Kondisi Umum

Capaian pembangunan Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2015-2019 didasarkan pada realisasi pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama pembangunan perikanan tangkap. Pembangunan perikanan tangkap memiliki 3 sasaran strategis utama yakni 1) terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan; 2) terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan, serta; 3) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Pencapaian sasaran strategis selanjutnya direpresentasikan melalui pencapaian indikator kinerja utama serta dukungan pelaksanaan kegiatan prioritas.

Perkembangan kondisi umum pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2015 -2019 sebagai berikut:

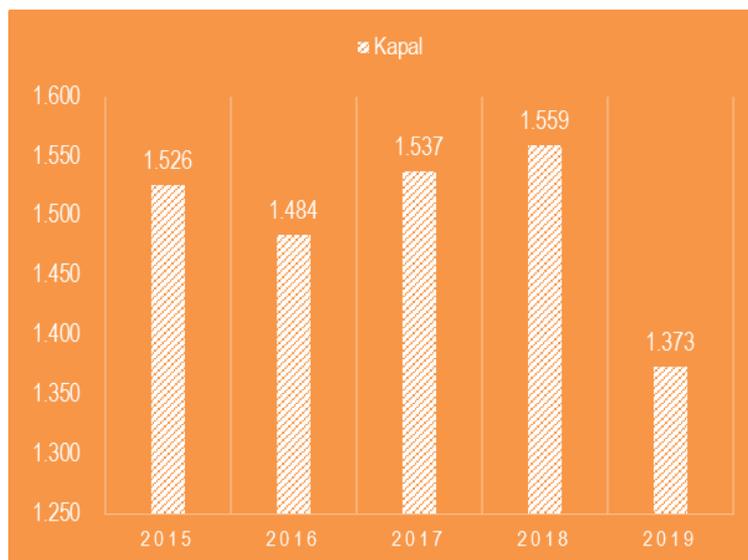
1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Realisasi NTN tahun 2015-2019 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,74 per tahun. Nilai tukar nelayan di tahun 2015 tercatat sebesar 106,14 meningkat cukup tinggi di tahun 2019 dimana tercatat sebesar 113,74. Meningkatnya capaian NTN tersebut sangat dipengaruhi oleh indeks harga yang diterima nelayan (IT) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (IB), dimana indeks harga yang diterima nelayan mengalami peningkatan sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan mengalami penurunan.

Selama tahun 2019, NTN mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan nelayan. Indeks harga yang diterima nelayan (IT) mengalami kenaikan sebesar 3,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata harga ikan mengalami peningkatan akibat perbaikan kualitas ikan yang diperjualbelikan. Sedangkan indeks harga yang dibayar nelayan (IB) juga mengalami peningkatan sebesar 2,72 persen dimana peningkatan terbesar adalah indeks konsumsi rumah tangga sebesar 3,22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh nelayan lebih kecil dibandingkan biaya yang diterima oleh nelayan.

2. Jumlah armada kapal perikanan

Jumlah armada kapal perikanan yang beraktifitas di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta selama kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 2,4% per tahun, hal ini selaras dengan tujuan dari pelabuhan perikanan untuk mengurangi jumlah kapal berpangkalan yang memanfaatkan pelabuhan sebab kapasitas kolam pelabuhan sudah overcapacity (jumlah kapal dikolam mencapai 800 kapal sedangkan kapasitas idealnya sekitar 400 kapal). Jumlah armada kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.526 unit, mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 menjadi 1.373 unit. Kapal perikanan di pelabuhan perikanan didominasi ukuran kapal 51-100 GT sebesar 36,6% dan ukuran kapal 101-200 GT sebesar 39,4%.

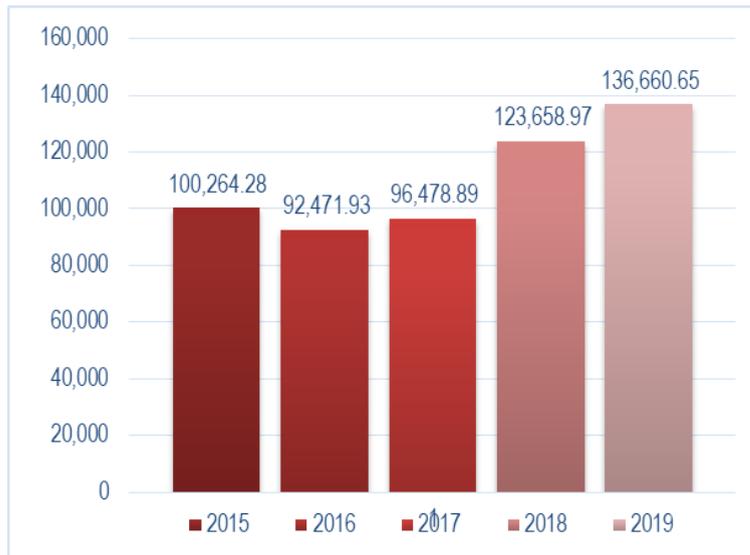


Gambar 1.1. Perkembangan Kapal Berpangkalan di PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2015-2019.

3. Volume Produksi Perikanan Tangkap

Rata-rata volume produksi perikanan tangkap di pelabuhan perikanan atau rata-rata volume produksi perikanan yang didaratkan oleh kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2015-2019 meningkat sebesar 8,8% per tahun. Volume produksi perikanan yang didaratkan oleh kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta pada tahun 2015 sebanyak 100.264,28 ton dan meningkat pada tahun 2019

sebanyak 136.660,65 ton. Peningkatan volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta ini ditunjang dengan dengan makin banyaknya pendaratan kapal perikanan di pelabuhan perikanan.



Gambar 1.2. Perkembangan Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2015-2019.

4. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Seiring dengan peningkatan realisasi volume produksi perikanan tangkap, realisasi rata-rata nilai produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 juga meningkat sebesar 17,66% per tahun. Nilai produksi perikanan tangkap tercatat sebesar Rp 112,90 milyar di tahun 2015 meningkat signifikan menjadi Rp.216,31 milyar pada tahun 2019. Nilai produksi perikanan tangkap jenis Cakalang, Tuna, Cumi, Layang dan Tongkol menyumbang sebagian besar dari capaian nilai produksi secara keseluruhan.

C. Lingkungan Strategis

Pembangunan perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi pada bagian sebelumnya akan dielaborasi pada konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya.

Secara khusus, proses identifikasi akan ditelaah sampai pada lingkup kegiatan. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasi ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah permusan alternatif arah kebijakan.

Sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang telah ditetapkan dengan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang akan ditempuh maka perlu diawali dengan analisis lingkungan strategis yang senantiasa berkembang dinamis. Analisis dimaksud mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, dimana masing-masing analisis ditinjau dari tiga aspek utama, yakni sosial, ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal, maka dapat diketahui unsur-unsur kekuatan (strength), kelemahan (weakness) peluang (opportunities) dan ancaman (threats). Keempat unsur tersebut harus dapat dianalisa untuk menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

1. Faktor Internal

a) Kekuatan

Dengan memperhatikan stakeholders dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta memiliki kekuatan yang dijabarkan sebagai berikut :

- o Lokasi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta cukup strategis sebab dekat dengan WPP 572, 573 dan 711 yang merupakan fishing ground ikan pelagis seperti Cakalang dan Tuna serta mudah dalam melakukan ekspor melalui transportasi udara (Bandara Soetta dan Halim Perdana Kusuma) dan transportasi laut (Pelabuhan Tanjung Priok).
- o Akses ke dan dari Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta mudah dan terbuka akses transportasi 24 jam.
- o Luas kawasan pelabuhan perikanan sebesar 110 Ha, yang terdiri dari kolam pelabuhan sebesar 40 Ha dan luas daratan sebesar 70 Ha.
- o Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta telah memiliki WKOPP yang direkomendasi Gubernur DKI Jakarta dan penetapan WKOPP oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- o Kapal perikanan yang berpangkalan dan memanfaatkan pelabuhan di dominasi kapal perikanan diatas diatas > 50 GT.

- o Kawasan pelabuhan perikanan telah berdiri industry/perusahaan perikanan tangkap/ UPI dengan skala besar serta usaha pendukungnya.
- o Penyerapan tenaga kerja/SDM di pelabuhan perikanan sangat banyak hingga diatas 50.000 orang.
- o Pelabuhan perikanan memiliki tempat pemasaran dan distribusi hasil perikanan melalui Pasar Ikan Modern (PIM) Muara Baru.
- o Potensi PNBPN di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta di atas 10 Milyar.

b) Kelemahan

Disamping kekuatan yang dimiliki, analisis terhadap lingkungan internal juga memperhatikan unsur-unsur kelemahan yang harus dipertimbangkan antara lain :

- o Luas kolam pelabuhan yang terbatas, sehingga kapal perikanan terjadi over capacity sehingga susah untuk dilakukan pengawasan dan berpotensi terjadi kecelakaan dan kebakaran.
- o Keterbatasan anggaran pelabuhan perikanan untuk melakukan perbaikan/ rehabilitasi fasilitas pelabuhan yang sudah mengalami kerusakan.
- o Kurangnya budaya bersih dan tertib ABK/ pengguna pelabuhan dikawasan pelabuhan perikanan.

2. Faktor Eksternal

a) Peluang

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pembangunan perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta adalah sebagai berikut :

- o Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah DKI Jakarta.
- o Semakin menguatnya nilai mata uang asing terhadap rupiah akan mendorong pengembangan ekspor dan peningkatan devisa.
- o Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun internasional, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk,

tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat yang semakin meningkat untuk mengkonsumsi produk pangan yang bergizi dan menyehatkan.

b) Tantangan

- o Kebijakan pemerintah dalam penentuan harga BBM yang belum berpihak pada nelayan dan industri perikanan.
- o Adanya duplikasi peraturan dan beragamnya jenis pungutan perikanan yang menghambat pengembangan usaha perikanan.
- o Maraknya IUU Fishing diperairan teritorial dan ZEEI.
- o Gangguan keamanan dan lemahnya penegakan hukum di laut.
- o Semakin meningkatnya akses produk-produk asing terhadap pasar dalam negeri sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan persaingan produk-produk perikanan menjadi semakin ketat.
- o Usaha perikanan masih didominasi nelayan kecil dan pemanfaatan yang bertumpu pada perairan pantai.
- o Masih rendahnya kemampuan masyarakat menyerap informasi yang ada di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan.
- o Rendahnya kualitas sumberdaya manusia perikanan khususnya nelayan yang bisa dilihat dari rendahnya tingkat pendidikannya menyebabkan proses alih teknologi dan ketrampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha.
- o Masih rendahnya mutu hasil perikanan yang menyebabkan nilai jual produk perikanan menjadi rendah.
- o Resistensi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan (perikanan) yang semakin meningkat.

D. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN- KP/2020 tanggal 16 Mei 2020, pelabuhan perikanan adalah unit pelaksana teknis di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dasar hukum pengelolaan pelabuhan perikanan antara lain :

1. Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Undang-Undang RI No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.
3. Undang-Undang RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
4. Undang-Undang RI No.18 Tahun 2008 tentang Sampah.
5. Undang-Undang RI No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut.
8. Peraturan Pemerintah RI No.85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
9. Peraturan Pemerintah RI No.49 Tahun 2011 tentang Usaha Perikanan.
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 52/PERMEN-KP/2014 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan.
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan.
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan.
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan.
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan.
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.20/PERMEN-KP/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan.
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.48/PERMEN-KP/2014 tentang Logbook Penangkapan Ikan.
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No.58/PERMEN-KP/2014 tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap, Alih Muatan (Transshipment) di Laut dan Penggunaan Nahkoda dan Anak Buah Kapal (ABK) Asing.
22. Keputusan Menteri No 52A/MEN/2013 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi.
23. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap RI No.18/DJPT/2009 tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Sebagai Lokasi Penerapan Ketentuan Port State Measures;
24. Keputusan Dirjen Perikanan Tangkap RI No.09/KEP-DJPT/2013 tentang Penetapan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala UPT Pelabuhan Perikanan yang dapat Melakukan Perpanjangan SIPI dan SIKPI Kapal Berukuran di Atas 30 (Tiga Puluh) sampai dengan 60 (Enam Puluh) GT.
25. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No 264/DPT.0/PI.540.S4/1/09 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Penanganan dan Penyimpanan Ikan di Kapal Penangkap/Pengangkut Ikan dan Inspeksi Pembongkaran Ikan di Pelabuhan.
26. Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No KEP.84/PER-DJPT/2013 Tentang Sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Pada Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikan.

E. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 20/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan, bahwa Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan, serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelabuhan Perikanan menyelenggarakan fungsi: a). penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan, dan evaluasi

pelabuhan perikanan; b). pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan; c). pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; d). pelaksanaan pemeriksaan Log Book; e). pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; f). pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; g) pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar; h). pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana; i). pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan; j). pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; k). pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; l). pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB); m). pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; n). pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan o). pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dijabarkan kedalam struktur organisasi dengan masing-masing tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis operasional kepelabuhanan, kapal perikanan, dan kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan; (b) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; (c) pelaksanaan pemeriksaan Log Book; (d) pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar; (e) pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan; (f) pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar; (g) pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi; (h) pelaksanaan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB); (i) pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan; dan (j) pelaksanaan bimbingan teknis operasional pelabuhan, kesyahbandaran, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pelayanan usaha.

2. **Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha;** mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pengendalian sarana dan prasarana, serta fasilitasi di pelabuhan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Tata Kelola dan Pelayanan Usaha menyelenggarakan fungsi : (a) pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian, serta pendayagunaan sarana dan prasarana; (b) pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, pengolahan, dan pemasaran, serta distribusi hasil perikanan; (c) pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha; dan (d) pelaksanaan bimbingan teknis tata kelola dan pelayanan usaha.

3. **Bagian Tata Usaha;** mempunyai tugas pelaksanaan dan penyusunan rencana dan program, dan anggaran, rumah tangga, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, keuangan, umum, pengelolaan Barang Milik Negara, pengendalian lingkungan, serta pelayanan masyarakat perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi: (a) pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran; (b) pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, umum; (c) pengelolaan Barang Milik Negara; (d) pelaksanaan pengendalian lingkungan; (e) pelaksanaan pelayanan masyarakat perikanan; (f) pelaksanaan urusan rumah tangga; dan (g) pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelabuhan Perikanan.

F. Maksud dan Tujuan

Dengan mempertimbangkan dinamika tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis, menuntut percepatan langkah strategis untuk menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat, melalui penjabaran kebijakan secara berjenjang.

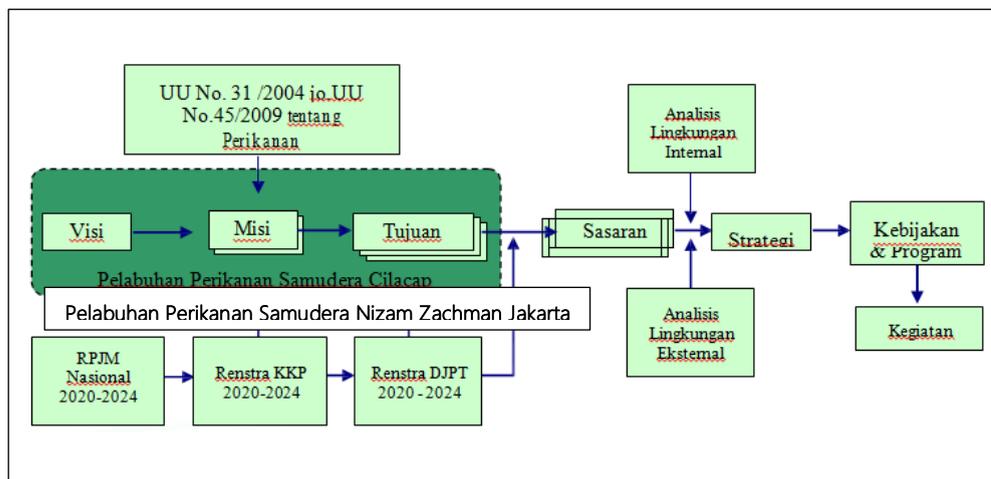
Maksud dan tujuan adanya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tahun 2020 – 2024, adalah merupakan arah dan pedoman pengembangan dan operasional guna mencapai hasil yang diinginkan dalam periode kurun waktu 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2020 s/d 2024. Dalam pelaksanaannya Rencana Startegis dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) secara sistematis dan berkesinambungan. Rencana

Strategis dimaksud diuraikan kedalam program dan kegiatan dengan memperhitungkan peluang, tantangan, ancaman dan hambatan yang mungkin timbul.

Rencana Strategis tersebut juga merupakan komitmen organisasi dan sekaligus diharapkan mampu memberikan motivasi dan petunjuk kepada stakeholders yang terlibat dalam aktifitas operasional pelabuhan.

D. Alur Pikir

Alur pikir penyusunan Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta tersaji pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.3. Alur Pikir Penyusunan Renstra PPS Nizam Zachman Jakarta

BAB II.

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong".

Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden yaitu:

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Peningkatan Daya Saing SDM KP
- Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Menjabarkan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

- 1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan**, yakni:
 - a. Mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan Perikanan
 - b. Mengembangkan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
- 2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan

- perikanan tangkap
- b. Meningkatkan mutu, daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**, yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati, serta
 - b. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - c. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
 4. **Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP**, yakni:
 - a. Meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi KKP

B. Pembangunan Perikanan Tangkap

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Visi Ditjen Perikanan Tangkap tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Ditjen Perikanan Tangkap melaksanakan 4 (empat) Misi Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

Misi 1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia

- Penumbuhan Kewirausahaan Masyarakat Perikanan Tangkap
- Penguatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Masyarakat Perikanan Tangkap Perempuan

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 4. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

- Mitigasi Perubahan Iklim terhadap Ekosistem Sumber Daya Perikanan
- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi Ditjen Perikanan Tangkap

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka tujuan pembangunan pembangunan perikanan tangkap adalah :

- 1. Meningkatkan Kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap**, yaitu peningkatan pemahaman, kapasitas, serta inisiatif inovasi masyarakat perikanan tangkap; dilakukan melalui pendampingan/fasilitasi usaha, diversifikasi usaha, pemberdayaan/perlindungan masyarakat perikanan tangkap, serta pengarusutamaan gender.
- 2. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing**, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
- 3. Mencapai Lingkungan Hidup Sumber Daya Perikanan Yang Berkelanjutan**, yaitu peningkatan kualitas lingkungan hidup pada sub bidang perikanan tangkap yang mencakup pengelolaan perikanan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); penerapan harvest strategy, alokasi izin usaha berbasis alokasi sumber daya ikan, penggunaan sarana prasarana penangkapan ramah lingkungan, serta implementasi konsep eco-infrastructure.
- 4. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap**, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi DJPT yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Sesuai dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dalam mengedepankan strategi *Pro Poor, Pro Job, Pro Growth, Pro Business* dan *Pro Sustainable* guna mendorong pemulihan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, serta memperhatikan lingkungan strategis yang bergerak dinamis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Renstra Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, maka dalam rangka mencapai visi yang tertuang dalam Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera (P P S)

Nizam Zachman Jakarta menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

Visi PPS Nizam Zachman Jakarta

Visi PPS Nizam Zachman Jakarta tahun 2020-2024 adalah Visi PPS Nizam Zachman Jakarta yaitu "Terwujudnya Perikanan Tangkap yang Maju dan Berkelanjutan serta Masyarakat Perikanan Tangkap yang Mandiri dan Sejahtera" untuk mewujudkan "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong".

Misi

PPS Nizam Zachman Jakarta melaksanakan 2 (dua) Misi yaitu :

Misi 2. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

- Peningkatan Nilai Tambah dari Pemanfaatan Infrastruktur Perikanan Tangkap
- Melanjutkan Revitalisasi Industri Perikanan Tangkap dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

Misi 8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

- Reformasi Birokrasi PPS Nizam Zachman Jakarta

Tujuan

Dalam menjabarkan misi PPS Nizam Zachman Jakarta, maka tujuan pelabuhan perikanan adalah :

- 5. Membangun Struktur Ekonomi Perikanan Tangkap Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing***, yaitu pembangunan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing pada sub bidang perikanan tangkap, melalui pengelolaan sumber daya perikanan berbasis industrialisasi; peningkatan produktivitas sarana prasarana penangkapan, peningkatan kualitas ikan hasil tangkapan, serta implementasi keterpaduan sistem logistik ikan di pelabuhan perikanan.
- 6. Mewujudkan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya di Lingkup PPS Nizam Zachma Jakarta***, yaitu upaya untuk mewujudkan reformasi birokrasi PPS Nizam Zachman Jakarta yang berkualitas, mencakup penataan kerangka kebijakan, profesionalisme ASN, keterbukaan perencanaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui implementasi komunikasi berbasis sistem informasi 4.0.

Sasaran Strategis

Dalam mencapai visi, misi dan tujuan, PPS Nizam Zachman Jakarta menetapkan sasaran strategis yaitu kondisi yang ingin dicapai PPS Nizam Zachman Jakarta sebagai suatu outcome/impact dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pelabuhan perikanan. Pada tahun 2020-2024, PPS Nizam Zachman Jakarta menetapkan 9 (sembilan) sasaran kegiatan, yaitu:

1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkatkan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dengan indikator kinerja meliputi:
 - Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp Juta).
2. Ketersediaan data produksi (pelabuhan perikanan) yang akurat, dengan indikator kinerja meliputi :
 - Rata-rata volume produksi perikanan tangkap (Ton).
3. Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dengan indikator kinerja meliputi :
 - Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk).
4. Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dengan indikator kinerja meliputi :
 - Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya (Orang).
 - Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) (orang).
5. Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dengan indikator kinerja meliputi :
 - Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta untuk menunjang PNBP Perikanan Tangkap (Unit).
6. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang berdaya saing, dengan indikator kinerja meliputi:
 - Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen).
7. Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dengan indikator kinerja meliputi:
 - Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (orang).

8. Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dengan indikator kinerja meliputi:
 - Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (laporan).
9. Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, dengan indikator kinerja meliputi:
 - Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (nilai).
 - Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (persen).
 - Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai).
 - IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (indeks).
 - Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen).
 - Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen).
 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (persen)
 - Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai).
 - Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (nilai).

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2020-2024 disusun berdasarkan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan. Arah dan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun untuk menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. (DJPT)
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. (DJPB)
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk, penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. (DJPDS, BKIPM)
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. (DJPR, DJPSDKP dan BKIPM)
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. (BRSDM).

Untuk mencapai 5 arah kebijakan di atas, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Strategi pelaksanaan arah kebijakan di atas sebagai berikut:

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi:

- 1) Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan;
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap.
- b. Penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dengan kegiatan utama meliputi:
- 1) Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional (Major Project) dengan berkoordinasi dengan K/L terkait, Pemerintah Daerah dan Badan Usaha.
 - 2) Penguatan Unit Pelaksana Teknis perikanan tangkap; dan
 - 3) Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT).
- c. Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dengan kegiatan utama meliputi:
- 1) Eksplorasi perikanan di ZEE dan laut lepas;
 - 2) Pengembangan lembaga pengelola WPP dan penguatan data stok sumberdaya ikan;
 - 3) Pengelolaan perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD); dan
 - 4) Partisipasi dalam organisasi pengelolaan perikanan regional yang melingkupi perairan indonesia (RFMOs).
- d. Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap dengan kegiatan utama meliputi: perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait.
- e. Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan dengan kegiatan utama meliputi:
- 1) Fasilitasi dan pengembangan skema pembiayaan yang murah dan mudah diakses, optimalisasi peran LPMUKP;
 - 2) Peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan kelompok nelayan perempuan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, dan penguatan kelompok usaha bersana melalui pembentukan korporasi nelayan (Major Project) berkoordinasi dengan kementerian Koperasi dan UKM dan pemerintah daerah;

- 3) Pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi tanah nelayan; dan
 - 4) Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital.
2. Perikanan budidaya dioptimalkan dan diperkuat untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan protein dan nilai tambah melalui akses permodalan, dan perlindungan usaha budidaya. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Optimalisasi perikanan budidaya air payau melalui major project "Revitalisasi tambak dikawasan sentra produksi udang dan bandeng" berkoordinasi dengan K/L terkait, pemerintah daerah dan badan usaha.
 - b. Pengembangan perikanan budidaya air Laut
 - c. Pengembangan perikanan budidaya air Tawar
 - d. Pengembangan budidaya ikan hias
 - e. Pengembangan budidaya rumput laut
 - f. Pengembangan pakan mandiri
 - g. Penataan perizinan usaha budidaya pusat dan daerah (Provinsi)
 - h. Pembangunan fasilitas perbenihan
 - i. Pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan
 - j. Produksi induk unggul dan benih bermutu
 - k. Pengujian residu produk perikanan budidaya dan sertifikasi untuk ekspor
 - l. Sertifikasi cara budidaya Ikan yang Baik (CBIB), cara perbenihan ikan yang baik (CPIB), dan cara pembuatan pakan ikan yang baik (CPPIB)
 - m. Sarana dan prasarana percontohan produksi serta usaha perikanan budidaya
 - n. Pembangunan infrastruktur perikanan budidaya antara lain meliputi saluran irigasi tambak dan keramba jaring apung
 - o. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - p. Sertifikasi lahan dan asuransi usaha perikanan budidaya
 - q. Penguatan UPT perikanan budidaya
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk,

penguatan sistem karantina ikan, peningkatan nilai tambah untuk peningkatan devisa. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:

- a. Pemetaan dan pemantauan logistik hasil perikanan
- b. Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik (koridor)
- c. Pembinaan pelaku usaha perikanan dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
- d. Pembinaan pelaku usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
- e. Sarana prasarana pengadaan dan penyimpanan ikan
- f. Pemetaan logistik hasil Perikanan di daerah
- g. Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan
- h. Keikutsertaan dalam promosi skala internasional dan investasi
- i. Pembinaan dan Pengelolaan Pasar Ikan
- j. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri (Provinsi)
- k. Peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen
- l. Pemetaan dan strategi akses pasar negara tujuan ekspor
- m. Partisipasi daerah dalam mendukung pemasaran produk kelautan dan perikanan
- n. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP yang dirumuskan
- o. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan
- p. Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP yang dibina
- q. Kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju zero waste
- r. Sarana rantai dingin dan peralatan pengolahan yang disediakan
- s. Ragam baru produk hasil kelautan dan perikanan bernilai tambah di lokasi yang dibina
- t. Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)
- u. Fasilitasi kemudahan pelaku usaha dan investasi
- v. uji terap produk inovasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang dihasilkan
- w. Sertifikasi SNI produk kelautan dan perikanan
- x. Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- y. Penanganan kasus mutu ekspor impor produk perikanan yang diselesaikan

- z. Operasional pengawasan dan penjaminan mutu hasil produk perikanan
 - aa. Sarana dan prasarana pengujian mutu
 - bb. Penguatan UPT
- 4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau – pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
 - a. Peningkatan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
 - b. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/ atau dimanfaatkan
 - c. Peningkatan produksi dan usaha garam nasional
 - d. Pembangunan sarana prasarana di kawasan wisata bahari
 - e. Peningkatan jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi
 - f. Peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil/ terluar
 - g. Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
 - h. Meningkatkan lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan dan/ atau rencana aksi pengelolaan
 - i. Pengelolaan Biofarmakologi
 - j. Fasilitasi perizinan pengelolaan perairan
 - k. Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - l. Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut
 - m. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)
 - n. Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan
 - o. Pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif
 - p. Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan SDKP yang efektif
 - q. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

- r. Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 - s. Penadarytahuan masyarakat KP dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang tertib dan bertanggungjawab
 - t. Operasional Pengawasan ekspor, impor dan domestik
 - u. Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri
 - v. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan karantina
 - w. Peningkatan UPT
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Hasil riset yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan dan sektor industri
 - b. Iptek hasil kegiatan riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP yang dimanfaatkan oleh masyarakat
 - c. SDM KP peserta diklat yang terserap di di Dunia Usaha dan Dunia Industri serta membentuk startup (usaha rintisan)
 - d. Penerapan Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan
 - e. Pembentukan kelompok kelautan dan perikanan mandiri
 - f. Pelatihan masyarakat KP yang bersertifikasi kompetensi
 - g. Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana riset, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan KP
 - i. Peningkatan UPT
6. Tatakelola pemerintahan yang baik. Strategi yang akan dilaksanakan adalah:
- a. Indeks Profesionalisme ASN
 - b. Indek SPBE
 - c. Level maturitas SPIP
 - d. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran KKP
 - e. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP
 - f. Nilai / Predikat Sakip KKP

Implementasi hal di atas dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan

menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Pengarusutamaan dalam Renstra 2020-2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Dokumen RPJMN 2020-2024 yang telah menetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatifadaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunansektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB 14 Ekosistem Lautan (Life Below Water) yang mencakup diantaranya: 1) Mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut; 2) Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan; 3) Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut; 4) Mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan; 5) Melestarikan wilayah pesisir dan laut; 6) Mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih; 7) Meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata berkelanjutan; 8) Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan; 9) Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan 10) Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menetapkan

hukum internasional yang tercermin dalam the United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

2. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di semua bidang pembangunan di tingkat pusat, dan daerah, yang mencakup: 1) Penguatan 7 prasyarat PUG: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, partisipasi masyarakat; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG); 3) Penyiapan roadmap PUG; 4) Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit eselon I di KKP dan antar pusat-daerah; 5) Pembuatan profil gender; dan 6) Monitoring dan evaluasi serta pengawasan Pengarusutamaan Gender (PUG) KKP.

3. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya adalah 1) Pelaksanaan pembangunan yang mengindahkan nilai budaya, kearifan lokal dan keragaman SDA hayati; 2) Pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan 3) Pemberdayaan masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil.

4. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarpras, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan one data serta penataan sistem perizinan berbasis web (online), termasuk penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui e-commerce.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perikanan Tangkap

Pendekatan Konseptual

Pembangunan sebuah sub sektor harus mulai dikembangkan ke dalam proses yang lebih dinamis; mempertimbangkan isu terkini serta berupaya mengantisipasi tantangan di masa mendatang untuk mencapai sebuah tujuan pembangunan. Selain itu dalam kerangka sistem perencanaan nasional, pembangunan sebuah sub sektor juga sudah seharusnya memiliki referensi yang erat dengan pembangunan pada skala yang lebih luas yakni sektoral maupun nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan tangkap terutama dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional pada agenda 1 “memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan” dan agenda 2 “mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan & menjamin pemerataan”. Agenda penguatan ketahanan ekonomi akan diwujudkan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan, serta akselerasi peningkatan nilai tambah. Adapun agenda pengembangan wilayah akan diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan dengan memperhatikan pendekatan spasial yang didasarkan bukti data, informasi dan pengetahuan yang baik, akurat dan lengkap.

Bisnis proses perikanan tangkap merupakan sebuah sistem yang menjelaskan bagaimana usaha perikanan tangkap berjalan, mulai dari penjabaran kegiatan

input, interaksi antar kegiatan, sampai pada alur pencapaian output dari pembangunan sub-sektor perikanan tangkap. Bisnis proses juga biasanya mengidentifikasi keterlibatan stakeholder serta menjelaskan hubungan keterkaitannya. Dengan demikian hal tersebut menegaskan kembali bahwa dalam konteks perencanaan strategis pembangunan perikanan tangkap, penyertaan kerangka bisnis proses sebagai dasar menjadi bersifat mutlak.

Mengacu pada perkembangan terkini konsep pengelolaan perikanan, manajemen perikanan tangkap akan diperspektifkan ke dalam 3 aspek utama yakni: 1) Manajemen nelayan; 2) Manajemen sumber daya ikan; serta utilisasi keduanya melalui 3) Manajemen usaha penangkapan ikan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajemen Nelayan

Manajemen nelayan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni dukungan terhadap usaha perikanan nelayan serta dukungan terhadap social security nelayan. Dukungan usaha perikanan bertujuan untuk mengakselerasi usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan, seperti misalnya perbaikan mindset, peningkatan kapasitas terhadap penggunaan teknologi, serta fasilitasi akses pendanaan.

Adapun dukungan terhadap social security bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga nelayan, melalui diversifikasi usaha serta fasilitasi penyaluran jaminan kesehatan, pendidikan, maupun perbaikan lingkungan permukiman nelayan. Manajemen nelayan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan kenelayanan.

2. Manajemen Sumber Daya Ikan

Manajemen sumber daya ikan terdiri dari 2 komponen utama pembentuk yakni pengaturan alokasi (sumber daya ikan dan izin) serta pemantauan pelaksanaan perizinan. Pengaturan alokasi mencakup instrumen pengalokasian SDI dan izin oleh pemerintah pusat serta proses pemberian izin baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun upaya integrasi izin pusat-daerah.

Adapun pemantauan pelaksanaan perizinan dilakukan melalui instrumen penerapan e-logbook, penempatan observer, serta peningkatan kepatuhan pada laporan LKU-LKP. Optimalisasi manajemen sumber daya ikan, utamanya akan dapat tercapai seiring konsep pengelolaan berbasis WPP diterapkan secara penuh. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen

kegiatan pada kegiatan pengelolaan sumber daya ikan dan kegiatan pengelolaan perizinan.

3. Manajemen Usaha Penangkapan Ikan

Manajemen usaha penangkapan ikan berisi segala mekanisme terkait pengaturan pemanfaatan sumber daya ikan oleh nelayan, sehingga sifatnya merepresentasikan irisan antara manajemen sumber daya ikan dan manajemen nelayan. Selain itu, manajemen usaha penangkapan ikan juga dapat dianggap sebagai ujung tombak sinergi antara penyediaan supply (sumber daya ikan) dan pemenuhan demand (hasil tangkapan ikan).

Mengacu pada peran strategis tersebut, manajemen usaha penangkapan ikan sebenarnya menjadi tahapan yang paling penting dalam mencapai berbagai outcome pembangunan perikanan tangkap, yakni meliputi peningkatan kelestarian sumber daya ikan, pendapatan nelayan, daya saing hasil tangkapan, kontribusi ekonomi langsung, serta multiplier effect lainnya. Manajemen sumber daya ikan mencakup berbagai komponen kegiatan pada kegiatan pengelolaan pelabuhan perikanan, dan kegiatan pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

Semakin tingginya faktor permintaan terhadap produk perikanan serta adanya potensi keterbatasan dukungan ekosistem perikanan, seringkali semakin mendorong ketidakseimbangan terhadap usaha penangkapan ikan yang ideal. Pembelajaran pada periode pembangunan sebelumnya tahun 2015-2019 semakin memperlihatkan bahwa tren pengelolaan perikanan tangkap di masa mendatang akan semakin mengerucut pada permasalahan supply dan demand. Untuk memenuhi keseimbangan supply-demand tersebut, hubungan 3 aspek utama dalam konsep manajemen perikanan harus berjalan secara seimbang, yakni antara aspek sosial, ekonomi serta aspek lingkungan ataupun seringkali direpresentasikan melalui hubungan antara stakeholder nelayan, pengusaha, dengan pemerintah (Gambar 3.1). Penggunaan pendekatan supply-demand juga dilakukan dalam rangka mewujudkan arah kebijakan utama industrialisasi sektor kelautan dan perikanan yang telah dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.



Gambar 3.1. Implementasi Pendekatan Supply-Demand terhadap Manajemen Perikanan Tangkap

Arah Kebijakan dan Strategi

Secara khusus, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan pada pembangunan sub sektor perikanan tangkap diarahkan untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan izin, pengembangan pelabuhan, penangkapan ikan sampai dengan ZEE dan laut lepas, serta peningkatan pendapatan melalui akses permodalan, perlindungan dan perbaikan hidup nelayan.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, Ditjen Perikanan Tangkap telah melakukan penterjemahan arah kebijakan pembangunan perikanan tangkap ke dalam 2 arah kebijakan yakni 1) Kebijakan Pokok dan 2) Kebijakan Pengarusutamaan, termasuk berbagai indikasi strategi pelaksanaan, serta penetapan kegiatan prioritas di dalamnya.



Gambar 3.2. Pendekatan Perencanaan Strategis Sub Sektor Perikanan Tangkap, Arah Kebijakan Utama, Serta Kegiatan Prioritas Tahun 2020-2024

1. Kebijakan Pokok

- a. Membuka komunikasi dengan stakeholder untuk harmonisasi kebijakan berbasis data, informasi dan pengetahuan yang factual. Kebijakan ini dilakukan melalui pendekatan: 1) Kajian atas regulasi dalam rangka percepatan investasi sub bidang perikanan tangkap; 2) Konsultasi publik dengan stakeholder untuk perumusan kebijakan; 3) Pendekatan ilmiah/akademik berbasis data dan pengetahuan faktual dalam perumusan kebijakan; 4) Koordinasi dengan Kementerian Koordinator dan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan kebijakan perikanan tangkap; 5) Kunjungan kerja dan diskusi stakeholders di pelabuhan perikanan dan sentra nelayan. Arah kebijakan ini dilakukan dengan basis pendekatan data faktual, keterbukaan informasi secara bertanggungjawab berbasis website dan transparansi, dan berbasis riset dan pengetahuan faktual.
- b. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap yang berkelanjutan. Pengelolaan perikanan tangkap dilakukan melalui peningkatan efektivitas tata kelola sumber daya perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) Optimalisasi Produktivitas Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
Utamanya akan dilakukan melalui utilisasi armada perikanan tangkap sebagai sarana prasarana utama produksi. Operasional kapal perikanan, selektivitas penggunaan alat penangkapan ikan, serta kapasitas awak kapal perikanan dapat dianggap sebagai ujung tombak dalam upaya menciptakan pengelolaan perikanan yang seimbang. Dalam hal ini artinya diharapkan perangkat armada perikanan tangkap tersebut, bukan hanya mampu menghasilkan volume produksi yang tinggi, namun juga produk perikanan yang

lebih berdaya saing, serta sekaligus dapat menjaga stabilitas ekosistem perikanan dan daya dukung lingkungan.

Tingginya peluang pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia, serta rencana akselerasi di ZEEI dan laut lepas perlu direspon melalui konsep industrialisasi sarana-prasarana penangkapan ikan, yakni meliputi: peningkatan efisiensi-kemampuan jangkauan operasional, kualitas hasil tangkapan, serta jaminan ketenagakerjaan. Sistem manajemen armada pun (pendaftaran, penandaan, persetujuan dan evaluasi operasional) perlu diperkuat pada lingkup nasional untuk dapat mewujudkan konsep industrialisasi yang berkelanjutan.

Restrukturisasi armada perikanan harus menciptakan kinerja yang lebih efisien melalui adopsi teknologi ramah lingkungan yang telah teradaptasi kearifan lokal. Pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan pun perlu ditingkatkan sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan pemahaman maupun kapasitas nelayan dalam pemanfaatannya.

Dalam upaya mewujudkan optimalisasi produktivitas sarana prasarana perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Restrukturisasi dan modernisasi kapal perikanan, alat penangkapan ikan, mesin dan alat penangkapan ikan;
- b) Peningkatan produktivitas penggunaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan;
- c) Peningkatan standarisasi kapal perikanan yang memenuhi aspek laik tangkap dan laik simpan, termasuk pemanfaatan energi terbarukan;
- d) Peningkatan standar rancang bangun, keselamatan dan keamanan kerja di kapal perikanan;
- e) Peningkatan nilai ekonomi ikan hasil tangkapan melalui peningkatan kualitas penanganan ikan di atas kapal perikanan (CPIB);
- f) Manajemen tata kelola (pendaftaran, penandaan, persetujuan pembangunan kapal dan pemantauan operasional) kapal perikanan nasional secara elektronik dan terintegrasi;

- g) Optimalisasi dan mekanisasi penangkapan ikan dengan penerapan rekayasa teknologi penangkapan pada alat penangkapan ikan, alat bantu penangkapan ikan dan armada perikanan tangkap; dan
- h) Perlindungan dan peningkatan kapasitas awak kapal perikanan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bidang perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

1. Pengembangan industri perkapalan nasional, untuk mendukung pergerakan industri perikanan nasional;
2. Intensifikasi tata kelola kapal perikanan nasional, khususnya pada kapal izin daerah dan kapal perikanan swasta;
3. Peningkatan keterlibatan pada tata kelola awak kapal perikanan;
4. Peningkatan manajemen data armada perikanan nasional.

2) Penyediaan Infrastruktur Perikanan Tangkap yang Terintegrasi

Implementasi pengembangan infrastruktur berdasarkan bisnis proses usaha perikanan tangkap menjadi kunci utama dalam mewujudkan industrialisasi; dengan mengedepankan outcome berupa efisiensi pengelolaan dan nilai tambah hasil tangkapan ikan. Sinergi pengembangan infrastruktur diarahkan bukan hanya bersifat antar sektor, melainkan juga antar wilayah, serta diperkuat dengan peningkatan konektivitas melalui intensifikasi teknologi informasi dengan basis data yang lebih akurat. Secara umum arah kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong sistem infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi dari hulu ke hilir, bermutu dan berdaya saing; termasuk integrasinya dengan sektor terkait, seperti industri, jasa, dan perhubungan/transportasi.

Pengelolaan berbasis WPP pun mendorong secara spesifik peran infrastruktur perikanan tangkap, utamanya pelabuhan perikanan untuk semakin diarahkan sebagai sentra lokasi dari setiap kegiatan perikanan tangkap di setiap WPP, serta untuk semakin mewujudkan konektivitas logistik ikan baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Artinya pelabuhan perikanan mulai memiliki tanggung jawab kewilayahan dalam menjalankan fungsinya. Untuk mendukung hal tersebut, melalui kegiatan

prioritas “Pelabuhan Perikanan Unggul”, fasilitas pelabuhan perikanan akan terus dikembangkan pada tahap lebih lanjut, serta ditingkatkan perannya.

Dalam upaya penyediaan infrastruktur perikanan tangkap yang terintegrasi, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan mutu ikan dan penerapan standarisasi ramah lingkungan melalui Eco Fishing Port, termasuk didalamnya penguatan instrumen SHTI;
- b) Penguatan SDM dan fungsi kesyahbandaran; intensifikasi pelibatan pemerintah daerah;
- c) Standarisasi ketersediaan-kualitas fisik sarana prasarana, operasional, fungsi pelayanan (ISO-9001), serta penetapan aspek hukum di wilayah kerja pelabuhan perikanan (WKOPP);
- d) Peningkatan sinergi bisnis perikanan terutama dengan sistem pengolahan dan pemasaran, termasuk melalui integrasinya dengan pasar ikan bertaraf internasional;
- e) Peningkatan keterpaduan pelabuhan perikanan UPT pusat dan UPTD dalam mengimplementasikan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan (RIPPN); baik dari aktivitas, data dan informasi, serta peningkatan konektivitasnya melalui sistem IT, termasuk melalui pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah maupun alternatif peningkatan kelembagaannya;
- f) Penguatan manajemen risiko fasilitas, termasuk terhadap faktor alam (pendangkalan, bencana alam); dan
- g) Peningkatan fungsi operasional SKPT Merauke, SKPT Natuna, SKPT Sebatik, dan SKPT Saumlaki.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

1. Alternatif pembiayaan dalam pembangunan fisik infrastruktur pelabuhan perikanan;
2. Sinergitas beberapa regulasi sebagai landasan pengembangan PP; terkait a) Pemerintahan Daerah, khususnya pada proses pengalihan P3D (Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) PP dan b) RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil);
3. Optimalisasi peningkatan peran PP sebagai sentra ekonomi dan pusat aktivitas nelayan; utamanya untuk memudahkan fungsi kontrol pemerintah;

4. Intensifikasi tata kelola pengembangan PP secara nasional, baik yang melalui penganggaran APBN KKP, DAK, APBD maupun swasta.

3) Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)

Inisiasi pengelolaan perikanan berbasis WPP telah dilakukan sejak satu dekade terakhir, namun operasionalisasinya belum optimal. Padahal sampai dengan saat ini instrumen kelengkapannya tergolong telah siap, mulai dari Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP), Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), infrastruktur dasar, maupun mekanisme pengaturan lainnya. Pengelolaan berbasis WPP diarahkan untuk berperan sebagai management authority yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengelola WPP, khususnya dalam pelaksanaan dan evaluasi RPP. Termasuk didalamnya menyelesaikan isu-isu pengelolaan perikanan, serta sebagai wadah koordinasi dan sinergi dari pengelolaan perikanan di masing-masing WPP.

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya, seperti pada wilayah perairan umum daratan; mempertimbangkan tidak sedikit daerah yang secara geografis memiliki banyak wilayah perairan umum daratan seperti sungai dan danau. Selain itu semakin strategisnya posisi Indonesia pada sistem perikanan global sekaligus pertimbangan terhadap kedaulatan NKRI, pemanfaatan usaha penangkapan ikan di ZEEI dan laut lepas juga akan lebih diakselerasi, khususnya pada komoditas unggulan seperti tuna, cakalang, tongkol. Di sisi lainnya peningkatan sistem jaminan ketelusuran terus didorong melalui perluasan cakupan penerapan e-logbook serta penempatan observer on board pada kapal perikanan.

Dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan operasionalisasi lembaga WPP dalam pengawasan, pengalokasian SDI, sinergi pembangunan pusat-daerah dan antar-daerah, serta penyelesaian isu kewilayahan termasuk nelayan andon;
- b) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui kepatuhan pelaksanaan e-logbook secara nasional untuk kapal > 5 GT, serta perluasan cakupan observer di atas kapal perikanan;

- c) Penguatan basis pengalokasian sumber daya ikan, sebagai dasar optimalisasi pemanfaatan;
- d) Peningkatan produktivitas perairan umum daratan, melalui perluasan cakupan pendataan serta pengembangan LP3D (Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat);
- e) Peningkatan produktivitas ZEEI dan laut lepas, khususnya melalui pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol; serta mendorong kerjasama bilateral, regional dan internasional, khususnya pada forum RFMO; dan
- f) Mendorong sertifikasi dan sistem ketertelusuran (traceability) hasil tangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

1. Penguatan basis data pengalokasian SDI; intensifikasi koordinasi dengan otoritas penyusun stok SDI dan akademisi (backward linkage);
2. Penguatan fungsi manajemen pemanfaatan SDI melalui pengendalian perairan overfishing dan optimalisasi perairan underfishing; Intensifikasi koordinasi dengan unit kerja pemanfaatan usaha (forward linkage), seperti dalam alokasi izin, kapal, dan pengembangan PP;
3. Intensifikasi koordinasi dengan Pemda terkait operasionalisasi WPP, penyelesaian andon, pemanfaatan perairan umum daratan.
- 4) Reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap.

Upaya pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fisheries (IUUF) sejauh ini telah terbukti mampu berkontribusi pada pemulihan stok sumber daya. Melanjutkan momentum baik tersebut, perizinan didorong untuk menjadi instrumen pengakselerasi usaha (dengan otoritas pemerintah terus melakukan penyederhanaan sistem) yang bertanggungjawab (dengan pelaku usaha semakin tertib aturan).

Dalam rangka mendukung pengelolaan berbasis WPP, alokasi dan evaluasi izin dari otoritas nasional harus menjadi acuan dasar untuk diaplikasikan secara ketat, termasuk di tingkat daerah. Sebagai langkah awal, upaya integrasi perizinan perlu diintensifkan, yakni antar K/L (KKP dan Kemenhub) maupun antara pusat-daerah (KKP dan Pemda). Dengan cakupan pengaturan yang luas dan bersifat antar kewenangan tersebut, pemutakhiran penggunaan e-service dan platform yang terintegrasi perlu

terus didorong untuk membangun sistem perizinan yang real-time, transparan, dan terukur.

Dalam upaya mengimplementasikan reformasi instrumen perizinan untuk keberlanjutan sumber daya ikan dan usaha perikanan tangkap, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan dan penyebarluasan SILAT;
- b) Sinergi mekanisme perizinan usaha penangkapan ikan dengan Kemenhub, termasuk upaya integrasi maupun intensifikasi pelaksanaan gerai di daerah;
- c) Sinergi sistem perizinan pusat dan daerah yang lebih tertata;
- d) Pemutakhiran dan peningkatan inovasi pelaksanaan e-services;
- e) Peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan usaha perikanan tangkap; dan
- f) Implementasi perizinan berdasarkan alokasi usaha penangkapan ikan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

1. Sinergitas regulasi terkait Pemerintahan Daerah; kewenangan perizinan dan penerbitan BPKP oleh pemerintah daerah
 2. Sinergitas peraturan daerah (Perda) terkait sistem perizinan, dalam upaya mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah
 3. Inovasi teknologi dalam pelaporan usaha untuk meningkatkan kualitas data pemanfaatan SDI dan potensi pendapatan negara
- 5) Pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan
- Mengacu pada pembelajaran sebelumnya bahwa program bantuan sebenarnya secara akumulatif dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan nelayan, namun dengan beberapa catatan seperti perlunya pelibatan aktif pemerintah daerah maupun nelayan itu sendiri. Dengan demikian kedepannya program serupa perlu didorong agar lebih memperhatikan perspektif stakeholder utama nelayan serta memposisikan DJPT bukan hanya sebagai pelaksana lapangan, melainkan juga koordinator dari sistem perlindungan nelayan yang lebih luas.

Pada dasarnya pemenuhan social security masih menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat miskin, termasuk nelayan. Kebutuhan biaya hidup sehari-hari, kesehatan, pendidikan keluarga, serta perbaikan lingkungan, mendorong nelayan untuk memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dari hasil penangkapan ikan. Sehingga secara psikologis,

nelayan akan sangat sensitif terhadap segala perubahan sistem yang dapat mempengaruhi tingkat penghasilannya. Pemenuhan kebutuhan dasar dimaksudkan juga agar nelayan lebih resisten terhadap ketidakpastian usaha penangkapan ikan, sekaligus untuk membentuk jaring pengaman sosial yang kuat dalam menghadapi berbagai situasi force majeure seperti bencana alam.

Dalam hal ini peran DJPT perlu dipertegas yakni untuk memfasilitasi peningkatan usaha nelayan serta sebagai koordinator/penyedia data kenelayan yang akurat untuk memfasilitasi bantuan antar sektor. Peran nelayan maupun pemerintah daerah pun perlu disinergikan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan nelayan secara tepat maupun mencegah timbulnya perbedaan persepsi antara nelayan dan pemerintah.

Dalam upaya pemberdayaan usaha dan perlindungan nelayan, beberapa indikasi kegiatan secara spesifik diarahkan untuk:

- a) Peningkatan kualitas hidup nelayan melalui pengembangan kampung nelayan maju;
- b) Perlindungan dan bantuan nelayan melalui bantuan premi asuransi nelayan, termasuk perluasan skema asuransi mandiri, bantuan sarana penangkapan ikan, dll;
- c) Pemberdayaan kapasitas nelayan terhadap risiko mata pencaharian melalui diversifikasi usaha, peningkatan kewirausahaan serta literasi manajemen keuangan;
- d) Peningkatan kerjasama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dari aspek permukiman (KemenPUPR), kesehatan (Kemenkes), Pendidikan (Kemendikbud), lingkungan (KemenLHK), dll;
- e) Penguatan kapasitas kelembagaan usaha nelayan; inovasi akses permodalan dan intensifikasinya termasuk melalui akses LPMUKP dan sertifikasi hak atas tanah nelayan, serta inisiasi pengembangan korporasi nelayan; dan
- f) Penguatan informasi kenelayan melalui intensifikasi pelibatan daerah dan komunikasi dengan nelayan.

Lingkungan strategis yang perlu diperhatikan

1. Penguatan database kenelayan untuk menjaring kerjasama pemberdayaan-perlindungan nelayan dengan lintas sektor, pemda, swasta;

2. Penguatan jalur & mekanisme komunikasi dengan nelayan untuk pemetaan kebutuhan nelayan secara tepat dan responsif;
 3. Mengarusutamakan nelayan sebagai subjek pemberdayaan, melalui perubahan mindset dan kapasitas nelayan untuk mandiri; bukan lagi hanya sebagai objek.
- c. Reformasi Birokrasi DJPT menuju birokrasi yang lebih berkualitas
- Reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka implementasi RB DJPT berdasarkan prioritas dan kepentingan nasional yang dilakukan melalui 5 pendekatan, yaitu: 1) Human Capital; 2) Organisation Capital (Right Sizing Organisation); 3) Financial and Planning Capital; 4) Information Capital, serta 5) Control Capital.

Di masa mendatang, tantangan sub-sektor perikanan tangkap diprediksi akan semakin besar, baik pada lingkup sektoral maupun global. Dengan demikian maka peran organisasi kesekretariatan perlu didorong bukan hanya terfokus pada fungsi administratif kesekretariatan saja melainkan juga mulai memperkuat fungsi sebagai unit kerja think-tank; berperan dalam memberikan berbagai saran-pertimbangan, memberikan respon cepat (quick analysis), serta mengembangkan teori dan model pembangunan perikanan tangkap. Kesekretariatan juga perlu lebih membuka diri untuk mempermudah koordinasi lintas sektor.

Dalam rangka mendukung hal tersebut, beberapa strategi secara spesifik diarahkan untuk: 1) Peningkatan inovasi program; 2) Intensifikasi manajemen berbasis IT; 3) Peningkatan skala kerjasama bidang perikanan tangkap baik di lingkup KKP (antar Eselon I) maupun Nasional (antar K/L, Pemda, BUMN, swasta); 4) Penerbitan peraturan terkait proses bisnis perikanan yang berkeadilan dan berkelanjutan; 5) Harmonisasi dan revisi regulasi terkait; dan 6) Penguatan manajemen data, dengan pendataan yang lebih menyeluruh.

K/L LAIN	PEMDA	KKP
PU-PERA Jalan / Rumah / Dermaga Pelabuhan / air bersih	Penyiapan lahan	Tata ruang/zonasi/masterplan
KEMEN-ATR Sertifikasi Tanah Nelayan	Identifikasi permasalahan di daerah	Sarana Sistem Rantai Dingin
KEMENDAGRI Percepatan P3D, sinergi pusat-daerah	Identifikasi / pengurusan administrasi / penyaluran bantuan	Penyuluhan, Pelatihan, Penguatan kelembagaan kelompok
KEMEN-KOPERASI Pembentukan / Pembinaan Koperasi	Manajemen data kenelayan	Riset teknologi perikanan tangkap
KEMHUB Pengukuran GT, dokumen kapal	Partisipasi pada forum kelembagaan WPP	Pengawasan SDKP
KEMENDES Sinergi dana desa, desa nelayan	Sinergi pembiayaan kegiatan prioritas nasional di daerah	Sarana Pemasaran
	Menggalang dukungan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak lainnya	BUMN

Gambar 3.3. Pemetaan Dukungan Stakeholder Potensial terhadap Pembangunan Perikanan Tangkap

2. Kebijakan Pengarusutamaan
 - a. Tujuan Pembangunan berkelanjutan
Strategi pelaksanaan meliputi: 1) Penerapan konsep ekonomi hijau; 2) Penerapan konsep eco fishing port; 3) Alternatif penggunaan bahan bakar gas untuk kapal perikanan; 4) Inovasi teknologi API ramah lingkungan.
 - b. Gender
Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penguatan peran wanita nelayan dalam usaha perikanan tangkap.
 - c. Modal sosial budaya
Strategi pelaksanaan dilakukan melalui pengaplikasian kearifan lokal dalam kegiatan penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan.
 - d. Transformasi digital
Strategi pelaksanaan dilakukan melalui penggunaan teknologi dalam sistem pemerintahan (e-logbook, e-services perizinan, e-layar, dll).

Untuk mengakselerasi pencapaian arah kebijakan tersebut, Ditjen Perikanan Tangkap telah menginisiasi beberapa kegiatan prioritas yang diharapkan dapat menjadi kunci, memberikan multiplier effect pada kegiatan lainnya, serta menghasilkan dampak langsung pada stakeholder. Kegiatan prioritas tersebut meliputi implementasi Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol, penyederhanaan regulasi perikanan tangkap, pengembangan pelabuhan perikanan unggul, pengembangan Kampung Nelayan Maju (KALAJU), serta armada perikanan yang kompetitif. Kegiatan prioritas setidaknya bersifat, namun tidak terbatas, sebagai akselerator setiap arah kebijakan serta terdapat unsur inovasi didalamnya. Kegiatan lainnya yang mengacu pada beberapa pertimbangan seperti dukungan legislatif dan berbagai kebijakan pimpinan lainnya masih

dapat dikategorikan sebagai kegiatan prioritas dalam konteks pembangunan perikanan tangkap secara utuh.

Kegiatan Prioritas DJPT Gambaran Umum

Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT), merupakan platform pengajuan izin usaha perikanan tangkap yang memungkinkan penerbitan izin dilakukan hanya dalam waktu 1 jam, dan keseluruhan prosesnya dilakukan secara online. Intensifikasi penggunaan serta berbagai pemutakhiran sistem perizinan masih terus akan dilakukan. Upaya reformasi perizinan ini merupakan salah satu gebrakan untuk meningkatkan pelayanan publik serta dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi perikanan tangkap. Pemanfaatan investasi tuna, cakalang, tongkol Peluang pemanfaatan investasi tuna diprediksi dapat mencapai Rp 7 Triliun. Seiring upaya diplomasi yang terus diintensifikasi dengan pengelola perikanan regional-RFMO, upaya peningkatan investasi-industrialisasi serta peningkatan kapasitas nelayan lokal pada komoditas TCT terus diakselerasi

Penyederhanaan regulasi Dalam rangka mewujudkan usaha penangkapan ikan yang berkeadilan serta iklim investasi yang baik, sejumlah peraturan disederhanakan dan beralih pada hukum positif. Beberapa substansi penyederhanaan utama meliputi kemudahan perizinan, pengaturan penggunaan alat penangkapan ikan yang sebelumnya dilarang, kemudahan transshipment, batasan ukuran kapal yang lebih berdaya saing di ZEEI-laut lepas serta lebih melindungi nelayan kecil di perairan kepulauan Pelabuhan Perikanan Unggul Peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai 1) pusat bisnis kelautan dan perikanan terintegrasi; 2) pusat layanan dan pendataan serta ketetelusuran yang maju, andal, dan akuntabel; serta 3) Eco Fishing Port, yakni dalam menjaga mutu ikan dan standarisasi ramah lingkungan

Kampung Nelayan Maju Konsep perwujudan lingkungan permukiman nelayan yang maju, bersih, sehat dan nyaman yang mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas kehidupan nelayan dan keluarganya. Salah satu strategi pengembangannya adalah melalui integrasi permukiman nelayan dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi, seperti pelabuhan perikanan dan kawasan wisata bahari-kuliner Armada Perikanan yang Kompetitif Untuk mewujudkan industrialisasi perikanan, diperlukan armada perikanan (kapal perikanan, alat penangkapan ikan, awak kapal perikanan), serta manajemennya yang kompetitif. Konsep yang diusung yakni pemenuhan aspek ketertelusuran

(traceability), standar keamanan kapal, penanganan ikan (fish handling), serta standar keselamatan kerja

Indikasi Pembangunan Kewilayahan

Sebagaimana amanat RPJMN 2020-2024 bahwa pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional harus berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan demikian pada bagian ini akan disajikan indikasi pembangunan perikanan tangkap tahun 2020-2024 berbasis kewilayahan berdasarkan: 1) Data Eksisting, yaitu sebaran 538 Pelabuhan Perikanan per WPP serta sebaran kapal perikanan perizinan pusat per WPP; maupun 2) Data Proyeksi, terdiri dari pertumbuhan volume produksi per provinsi, pertumbuhan nilai produksi per provinsi, pertumbuhan jumlah nelayan per provinsi, pertumbuhan NTN per provinsi, pertumbuhan volume produksi per WPP, produksi komoditas TCT per WPP, serta produksi komoditas utama per WPP.

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Indikator kinerja Tahun 2020-2024 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta telah ditetapkan sebagaimana table dibawah ini:

Tabel 4.1 Matrik Target Indikator Kinerja PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2020-2024

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
SS1	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	1	Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Rp.juta)	5,412.30	8,455.78	21.074,30	23,181.73	25,499.90
SS2	Ketersediaan data produksi (pelabuhan perikanan) yang akurat	2	Rata-rata volume produksi perikanan tangkap (Ton)	5,471	6,033	6,153	6,277	6,402
SS3	Pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan yang berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	3	Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan (Produk)	-	-	80	80	80
SS4	Pengelolaan awak kapal perikanan yang tersertifikasi/terlindungi di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	4	Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/ kompetensinya (Orang)	100	200	30	250	300
		5	Awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut (PKL) (Orang)	-	-	30	30	30

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	
SS5	Pemenuhan prasarana pemungutan PNBP perikanan tangkap yang optimal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	6	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta untuk menunjang PNBP Perikanan Tangkap (Unit)	-	-	1	1	1
SS6	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta yang berdaya saing	7	Tingkat Operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	80	81	82	83	84
SS7	Pengelolaan kenelayan yang maju dan berdaya saing di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	8	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya (Orang)	50	24	48	50	55
SS8	Tata kelola sumber daya ikan di WPPNRI perairan laut yang bertanggung jawab di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	9	Laporan Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi (Laporan)	1,100	700	1,400	1,500	1,600
SS9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	10	Nilai Capaian Pembangunan Zona integritas menuju WBK Pelabuhan Perikanan (Nilai)	45,10	75,07	45,10	75,07	75,07
		11	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (Persen)	-	-	100	100	100
		12	Nilai PMSAKIP Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	85	85,15	85.25	85.25	85.25

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3		4	5	6	7	8
SS9	Tata Kelola pemerintah yang baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta	13	IP ASN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Indeks)	72	73	79	79	79
		14	Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas /strategis di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	-	-	75	75	75
		15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	-	72,5	75	75	75
		16	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Persen)	-	72,5	75	75	75
		17	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	Baik (88)	Baik (89)	Baik (89)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
		18	Nilai Kinerja Anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nilai)	85	86	86	87	87

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta Tahun 2020-2024, maka diperlukan pendanaan baik dari APBN. Adapun kegiatan dan anggaran Tahun 2020-2024 Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta untuk Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Rencana Pendanaan Kegiatan dan Anggaran di PPS Nizam Zachman Jakarta Tahun 2020-2024

No	Program/Kegiatan (Output)	Alokasi Anggaran (Juta Rupiah)					Lokasi	APBN (Pusat/DK/TP)
		2020	2021	2022	2023	2024		
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		1,013,782,000	11,953,254,000	17,388,619,000	19,146,680,900	21,058,548,990		
1	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	256,952,000	25,095,000	29,995,000	32,994,500	36,293,950		
A	Laporan data logbook penangkapan ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	248,702,000	25,095,000	29,995,000	32,994,500	36,293,950	Jakarta	Pusat
B	Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumber daya ikannya	8,250,000	-	-	-	-	Jakarta	46 Pusat g e

No	Program/Kegiatan (Output)	Alokasi Anggaran (Juta Rupiah)					Lokasi	APBN (Pusat/DK/TP)
		2020	2021	2022	2023	2024		
2	Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan	27,000,000	-	148,000,000	162,800,000	179,080,000		
A	Perizinan Produk	-	-	120,000,000	132,000,000	145,200,000	Jakarta	Pusat
B	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	27,000,000	-	28,000,000	30,800,000	33,880,000	Jakarta	Pusat
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	666,000,000	11,900,963,000	17,202,624,000	18,922,886,400	20,815,175,040		
A	Sertifikasi Produk	-	39,800,000					
B	Pelayanan Publik Lainnya	-	1,927,550,000					
C	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	4,995,810,000	8,290,243,000	12,380,375,000	13,618,412,500	14,980,253,750	Jakarta	Pusat
D	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	666,000,000	1,643,370,000	4,822,249,000	5,304,473,900	5,834,921,290	Jakarta	Pusat
4	Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan	63,830,000	27,196,000	8,000,000	28,000,000	28,000,000		
A	Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	Jakarta	Pusat
B	Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	55,830,000	19,196,000	-	20,000,000	20,000,000	Jakarta	Pusat
	Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Tangkap	21,558,119,000	23,393,272,000	20,049,232,000	22,304,155,200	24,509,570,720		
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	21,558,119,000	23,393,272,000	20,049,232,000	22,304,155,200	24,509,570,720		
A	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20,983,158,000	18,648,069,000	19,869,082,000	21,855,990,200	24,041,589,220	Jakarta	Pusat
B	Layanan Manajemen SDM Internal	23,000,000	31,210,000	14,050,000	15,455,000	17,000,500	Jakarta	Pusat
C	Layanan Manajemen Kinerja Internal	551,961,000	857,169,000	166,100,000	182,710,000	200,981,000	Jakarta	Pusat
D	Layanan Sarana Internal	-	3,856,824,000	-	250,000,000	250,000,000	Jakarta	Pusat
	TOTAL	22,571,901,000	35,346,526,000	37,437,851,000	41,450,836,100	45,568,119,710		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020–2024 (perubahan) merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap, sehingga penyusunan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Renstra Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap Tahun 2020-2024 (perubahan) disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kegiatan-kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional menjadi prioritas utama, selain kegiatan-kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap. Namun demikian, Renstra ini dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian-penyesuaian sejalan dengan dinamika perkembangan internal dan eksternal organisasi.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap juga dihasilkan berkat adanya dukungan seluruh jajaran pegawai pelabuhan, instansi terkait dan stakeholder dikawasan pelabuhan perikanan. Kerja keras dari seluruh pimpinan dan pegawai Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan serta sasaran kegiatan Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, Ditjen Perikanan Tangkap yang tertuang dalam Rencana Strategis ini.